

ABSTRACT

Japan's Ministry of Foreign Affairs, Fumio Kishida, announced Visa exemption policy for Indonesian citizens in 2014. Visa exemption policy is a relaxation of Japan's visa requirement for Indonesian citizens who plan to enter Japan. This policy allowed Indonesian citizens to enter Japan without obtaining Japanese visa for 15 days of stay and without remunerative activities. As the announcement of visa exemption policy, Japan's visa policy for Indonesian citizens who plan to enter Japan changed from requiring a visa to visa exemption. The aims of this research are to analyze the factors that motivate Japanese government in taking visa exemption policy for Indonesian citizens in 2014. The information in this research collected in years before or after 2014 where visa exemption policy for Indonesian citizens is announced. The theory of decision-making process by William D. Coplin will be used to analyzing the factors that motivate Japan taking visa exemption policy to Indonesia in 2014. As the result, the factors that motivate Japan in taking visa exemption policy for Indonesia in 2014 are, first: Actor in Japan's domestic politics supports the establishment Japan as the tourism-oriented country with targeting huge number of visitors each year. Second, Japan economic capabilities show a high number of government debt; therefore, visa exemption will increase the number of visitors and beneficial for Japan's economic. The last is the international context of Indonesia which, geographical, economy and political condition of the region where Indonesia is located important for Japan's interest. Therefore, visa exemption is as a soft power to promote Japan's interest. In addition, the result of the research shows that to releasing Japan as the tourism-oriented country is the main factor that motivates Japan in taking visa exemption policy to Indonesia in 2014. Indonesia is potential country in the term of demographic and shows an increasing trend of inbound visitors to Japan.

Keywords: Japan's foreign policy, Japanese visa, Indonesian citizens, and visa exemption policy.

ABSTRAK

Menteri luar negeri Jepang, Fumio Kishida, mengumumkan berlakunya kebijakan bebas visa kepada Indonesia pada tahun 2014. Kebijakan bebas visa yang diberikan berupa kemudahan dengan penghapusan persyaratan pengajuan visa Jepang untuk penduduk Indonesia yang berencana mengunjungi Jepang. Dengan berlakunya kebijakan bebas visa, pemerintah Jepang memberikan izin kepada penduduk Indonesia yang berencana mengunjungi Jepang tanpa visa dengan waktu tinggal 15 hari dan tanpa kegiatan “*remunerative*”. Dengan diumumkannya kebijakan bebas visa, kebijakan visa Jepang kepada penduduk Indonesia yang berencana mengunjungi Jepang berubah dari mengharuskan mendaftar visa Jepang menjadi bebas visa Jepang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa faktor yang memotivasi pemerintah Jepang dalam memberikan bebas visa kepada Indonesia yang mulai berlaku pada tahun 2014. Informasi dalam penelitian ini dikumpulkan sesudah dan sebelum tahun 2014, dimana pemerintah Jepang mengumumkan berlakunya kebijakan bebas visa kepada Indonesia. Teori pengambilan keputusan kebijakan luar negeri oleh William D. Coplin digunakan untuk menganalisa faktor-faktor yang memotivasi pemerintah Jepang dalam memberikan kebijakan bebas visa kepada Indonesia.

Dan sebagai hasil dari penelitian ini, faktor yang memotivasi pemerintah Jepang dalam memberikan bebas visa kepada Indonesia adalah, pertama, aktor-aktor politik dalam negeri Jepang mendukung Jepang sebagai negara yang berorientasi pada wisata dengan menargetkan banyaknya jumlah wisatawan yang berkunjung ke Jepang setiap tahun-nya. Kedua, kemampuan ekonomi Jepang menunjukkan angka jumlah hutang negara yang sangat tinggi. Olehkarena itu dengan di berlakukannya kebijakan bebas visa akan meningkatkan jumlah wisatawan yang mengunjungi Jepang dan akan berdampak pada kemampuan ekonomi Jepang. Yang terakhir konteks internasional Indonesia, yang mana keadaan geografi, ekonomi dan politik wilayah dimana Indonesia berlokasi penting buat kepentingan nasional Jepang. Olehkarena itu, kebijakan bebas visa bisa dianggap sebagai *soft power* untuk mempromosikan kepentingan nasional Jepang. Sebagai tambahan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa membuat Jepang sebagai negara yang berorientasi pada wisata adalah faktor utama yang memotivasi pemerintah Jepang dalam memberlakukan bebas visa kepada Indonesia pada tahun 2014. Indonesia juga merupakan negara yang potensial dalam jumlah penduduk dan juga penduduk Indonesia menunjukkan kecenderungan peningkatan kunjungan ke Jepang.

Keywords: Japan's foreign policy, Japanese visa, Indonesian citizens, and visa exemption policy.